



**"Tema: 6 (rekayasa sosial dan pengembangan perdesaan) "**

**"MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS SISTEM  
KEBUN BERSAMA UNTUK MEWUJUDKAN PROGRAM  
KOTAKU"**

Oleh

**"Dijan Rahajuni<sup>1</sup>, Lilis Siti Badriah<sup>2</sup>, Sri Lestari<sup>3</sup>"**

**"Jurusan IESP FEB Universitas Jenderal Soedirman<sup>1</sup>, Jurusan IESP FEB  
Universitas Jenderal Soedirman<sup>2</sup>, Jurusan Manajemen FEB Universitas  
Jenderal Soedirman<sup>3</sup>"**

**"dijan\_rahajuni@yahoo.com<sup>1</sup>, ummililis@yahoo.co.id<sup>2</sup>,  
cicimanajemen@gmail.com<sup>3</sup>"**

**ABSTRAK**

Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) adalah merupakan upaya pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan, dengan target 100-0-100 pada tahun 2019. Kekumuhan pada suatu kawasan diakibatkan karena ; kurang tersedianya prasarana publik, kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakatnya, ketidakmerataan pemilikan lahan dan kurang kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya. Penyediaan sarana publik oleh pemerintah untuk mewujudkan 0 persen wilayah tanpa kumuh harus disertai kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Sistem Kebun Bersama merupakan suatu kepedulian dan pola pengelolaan lahan (tanah) oleh kelompok kelembagaan sosial masyarakat seperti Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KSM) Ekonomi eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM\_M) dan Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang diakibatkan karena ketidakmerataan distribusi pemilikan lahan dan ketidakpedulian pemilik lahan, untuk diusahakan sebagai warung hidup melalui suatu kesepakatan yang jelas antara pemilik dan kelompok kelembagaan sosial masyarakat. Pengelolaan lahan yang terbengkelai melalui Sistem Kebun Bersama berdampak secara ekonomi dan non ekonomi. Dampak ekonomi berupa pengurangan pengeluaran anggota kelompok untuk belanja kebutuhan konsumsi sayur dan bumbu, dan kemandirian keuangan kelompok. Dampak non ekonomi berupa mengurangi kekumuhan,

---



peningkatan kegiatan kelompok masyarakat, peningkatan kerukunan kehidupan bermasyarakat, mendidik generasi muda cinta tanah air, mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kata kunci : *Kotaku, 100-0-100, Sistem Kebun Bersama, KSM, PKK*

## **ABSTRACT**

The Kotaku program (City without Slums) is an effort to develop and developing urban areas through handling the quality of the settlement environment, through improving the quality of slums, preventing the growth and development of new slums, and sustainable livelihoods, with a target of 100-0-100 in 2019. Slum in an area caused by; lack of public infrastructure, poverty and powerlessness of the community, inequality of land ownership and lack of community awareness of the environment. The public facilities provided by the government to realize 0 percent of the area without slums must be accompanied by environment consciousness by the community. The Joint Plantation System is a form of social awareness and a pattern of land management by social community and institutional groups such as Community Self-Reliance Groups (KSM), ex-National Independent Community Empowerment National Program, and Family Welfare Empowerment Program (PKK). This system caused by unequal distribution of land ownership and lack of awareness of the owner's land, to be cultivated as a food stall through a clear agreement between the owner and the social community or institutional group. Management of an idle land through the Joint Plantation System has economic and non-economic impacts. The economic implications are reducing group member's expenditure on spending on vegetables and spices consumption, and create group financial independence. Non-economic impacts in the form of reducing the slums, increasing the activities of community groups, increasing harmony in community life, educating the younger generation love the motherland, supporting sustainable development.

*Keywords: Kotaku, 100-0-100, Joint Plantation System, KSM, PKK,*

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan ekonomi yang berorientasi pada industrialisasi untuk meningkatkan produksi dan pertumbuhan ekonomi telah merubah orientasi pemerintah dan masyarakat untuk lebih menitik beratkan sektor industri dibandingkan dengan sektor pertanian. Hal ini karena memang sektor industri lebih cepat menghasilkan nilai tambah dibandingkan dengan sektor pertanian. Keberadaan dan perkembangan sektor industri di Indonesia lebih banyak terdapat pada wilayah perkotaan, hal ini karena pada wilayah perkotaan lebih banyak tersedia fasilitas yang dibutuhkan oleh dunia industri seperti jalan raya sebagai sarana transportasi, listrik, perbankan dan perkantoran pemerintah ataupun swasta pendukung dunia industri. Kondisi demikian juga menarik tenaga kerja untuk berurbanisasi ke kota baik yang bersifat menetap (*inhabitant*) dan ataupun yang bersifat sementara (*commuter*). Urbanisasi penduduk menambah kepadatan penduduk di perkotaan (Khadiyanto, 2005) dan menimbulkan masalah lingkungan dan sosial yang berakibat pada kekumuhan. Kekumuhan pada suatu komunitas masyarakat menunjukkan adanya ketidakpedulian masyarakat yang diakibatkan karena ketiadaan sumber daya seperti kemiskinan. Pertumbuhan penduduk di wilayah perkotaan juga menyebabkan perluasan kota dan mengurangi lahan pertanian di wilayah pinggiran perkotaan (Eko Trigus dan Sri Rahayu, 2012), sehingga dapat menimbulkan masalah kekumuhan baru dan pengurangan lahan pertanian.



Pengurangan lahan pertanian tanpa disertai dengan peningkatan kemajuan teknologi pertanian akan mengganggu pembangunan berkelanjutan, mengingat produk-produk pertanian merupakan penyangga utama kehidupan berkelanjutan.

Pelaksanaan program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan, dengan tujuan pada tahun 2019 tercapai suatu kondisi 0 persen permukiman tanpa kumuh pada wilayah perkotaan. Kekumuhan terjadi karena tempat hunian dan lingkungannya padat penduduk, kurang tersedia sarana dan prasarana publik, dan sosial budaya masyarakat (Ganjar Susilo, Suherna, Juari, 2018). Untuk mengurangi kondisi tersebut dilakukan melalui peningkatan akses pelayanan masyarakat terhadap infrastruktur pelayanan perkotaan dan permukiman kumuh, pengembangan kelembagaan program dan mendorong kehidupan berkelanjutan di wilayah kumuh melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat (Dirjen Cipta Karya, 2016). Program Kotaku merupakan kelanjutan dan peningkatan dari program PNPM-MP yang telah berhasil mengurangi kemiskinan melalui pemberian pinjaman bergulir untuk melakukan kegiatan ekonomi produktif meskipun belum mencapai pada pemenuhan kebutuhan hidup layak (Rahajuni Dijan, 2017). Keberhasilan PNPM-M itu selain adanya ketersediaan dana dari pemerintah juga karena adanya pengembangan kelembagaan di masyarakat, yaitu kelembagaan kelompok penerima manfaat dalam hal ini KSM Ekonomi, pemerintahan lokal dan pengelola program.

Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat adalah merupakan salah satu wilayah di Kabupaten yang termasuk dalam kategori kumuh ringan dan dengan jumlah penduduk yang padat (SK Bupati Banyumas No.050 / 1444 / Tahun 2014). Untuk mengurangi kekumuhan di suatu wilayah tersebut tidak boleh hanya mengandalkan pada kebijakan dan pembiayaan dari pemerintah namun harus melibatkan masyarakat penerima manfaat program secara aktif. Menurut Anna Strempele, 2011 masyarakat akan mau terlibat aktif dalam suatu proyek apabila mereka merasakan bahwa kegiatan yang dilakukan dapat memberikan manfaat bagi mereka. Oleh karena itu untuk melibatkan masyarakat dan ataupun memberdayakan masyarakat dalam suatu program diperlukan model pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kondisi di mana masyarakat tinggal, kondisi ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat dan kemanfaatan program yang nantinya akan diterima oleh masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya pembangunan dalam mana terdapat adanya kesenjangan dalam masyarakat melalui meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat yang berada dalam posisi kurang beruntung untuk memberdayakan diri dan lingkungannya, menuju pada perbaikan dan kesetaraan. Pemberdayaan masyarakat akan berhasil apabila dalam masyarakat terdapat perubahan-perubahan kearah perbaikan kehidupan baik secara



ekonomi, sosial dan budaya yang bersifat pembaharuan (Mardikanto Totok, 2013). Menurut Lionberger, 1982 pembaharuan bukan berarti sesuatu tindakan yang baru sama sekali, namun baru dalam arti bahwa bahwa tindakan atau inovasi tersebut belum pernah diterapkan pada masyarakat yang akan diberdayakan, dan ataupun kearifan lokal (*lokal wisdom*) serta penggalian terhadap teknologi lama yang sudah ditinggalkan (*indigenous teknologi*) dan memberikan nilai tambah bagi penerima manfaat. Rahajuni Dijan, Lilis Siti Badriah, Sri Lestari, 2017 untuk mesinergiskan kegiatan eks PNPM-M yang masih berjalan yaitu KSM ekonomi ke dalam program Kotaku diperlukan strategi *grow and build dan hold and maintain*, hal ini berarti bahwa keberadaan KSM ekonomi perlu dilanjutkan dan dikembangkan pengelolaannya melalui suatu kegiatan yang lebih bersifat mandiri.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan model pemberdayaan masyarakat pada wilayah perkotaan yang kumuh dan padat penduduk pasca PNPM-M dilihat dari pengelolaan lahan pekaranga. Tujuan penelitian adalah untuk menemukan model pemberdayaan masyarakat berbasis pada pemanfaatan lahan dalam rangka mengurangi kekumuhan di wilayah perkotaan dan meningkatkan penghidupan berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian bersifat kualitatif, dilakukan tahun 2018, di wilayah Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat bagian utara yaitu di RT 6 RW 7, bagian tengah di RT 5 RW 8 dan bagian Selatan di RT 2 RW 2; dengan jumlah sampel 79 rumah tangga yang tinggal di wilayah dalam kategori kumuh. Obyek penelitian pola pengelolaan lahan pekarangan, hal ini karena salah satu penyebab kekumuhan adanya lahan pekarangan yang tidak dikelola dengan baik dan dipergunakan tidak sebagaimana mestinya. Penelitian menggunakan data primer, dengan menggunakan metode wawancara dan kuesioner. Sumber data masyarakat, TP PKK dan aparaturn Kelurahan Kedungwuluh.

Penelitian ini merupakan penelitian terapan, yang dilakukan melalui tahapan penggalian data informasi secara mendalam melalui triangulasi ((Moleong, 2009), *Focus Group Discussion* (FGD), penerapan hasil FGD, Observasi dan evaluasi, pengambilan kesimpulan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dari 79 responden 6 responden tidak memiliki lahan, karena mereka menyewa rumah. Kondisi kepemilikan lahan responden pada wilayah penelitian rata-rata luasnya 101,5 m<sup>2</sup>, luas pemilikan lahan yang tersempit 30 m<sup>2</sup> dan paling luas 434 m<sup>2</sup>; rata-rata digunakan untuk tempat tinggal seluas 72 m<sup>2</sup> atau 71 persen; dengan demikian masih dapat pemilikan lahan yang tersisa yang disebut sebagai pekarangan. Pekarangan adalah sebidang tanah darat yang terletak langsung di sekitar rumah tinggal dan jelas batas-batasnya (Sudarti dan Arnold C.Turang, 2015). Rata-rata



pemilikan luas pekarangan 29,4 m<sup>2</sup> luas pemilikan lahan pekarangan tersempit 2 m<sup>2</sup> dan terluas 314 m<sup>2</sup>.

Penyebab kekumuhan suatu kawasan menurut Ganjar Susilo, Suherna, Juari, 2018 karena Segi fisik, yaitu gangguan yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alam seperti udara dan air dan Segi masyarakat yaitu, gangguan yang ditimbulkan oleh manusia sendiri seperti kepadatan penduduk dan sampah. Pada wilayah penelitian kekumuhan disebabkan karena adanya ketidakpedulian masyarakat terhadap lingkungan terutama dalam hal pengelolaan lahan pekarangan. Kondisi ini didukung dengan pengakuan responden yang menyatakan bahwa mereka kurang puas terhadap pengelolaan lingkungan (56 persen), kepuasannya sedang 14 persen dan puas sebanyak 30 persen. Kekurangpuasan mereka secara eksternal disebabkan karena adanya tetangga yang membuang sampah tidak pada tempatnya, yaitu pada sembarang tanah yang kosong yang tidak dimanfaatkan atau terbengkelai kondisi ini terjadi di Rt 2 RW 2 dan di RT 5 RW 8 dan di pinggir jalan. Di wilayah RT 6 RW 7 terdapat lahan pinggir jalan terbengkaelaikan yaitu di sepanjang aliran irigasi Kranji. Secara internal disebabkan karena kondisi internal responden sendiri seperti pemilikan pekarangan yang sempit, tanah yang tidak subur, harus sering dibersihkan, dan repot mengurus anak.

Untuk pemanfaatan pekarangan yang dimiliki rata-rata digunakan untuk tempat parkir (16 persen), tempat jemuran (16 persen), tanaman (61 persen), beternak (3 persen), jualan (1 persen), dan disewakan 3 persen. Tingkat kepuasan responden terhadap pemanfaatan lahan pekarangan berada pada katengori kurang puas 56 persen, kepuasan sedang 10 persen dan puas 22 persen. Tingkat kepuasan yang tinggi terhadap pengelolaan pekarang dikarenakan mereka dapat menikmati keindahan tanaman dan hasilnya, misalnya sayuran, buah-buahan dan tanaman hias. Lahan pekarangan memiliki potensi dalam penyediaan bahan pangan keluarga, mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk pembelian pangan dan meningkatkan pendapatan rumah tangga petani (Ashari, Saptana, dan Tri Bastuti Purwantini, 2012). Oleh karena itu menurut Sugito, Susilowati, Muhammad Al Kholif, 2017 diperlukan Strategi pemberdayaan pemanfaatan lahan secara optimal untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan perubahan iklim, melalui pendekatan yang tepat, komitmen kelompok dan peran aparatur pemerintah daerah. Pemberdayaan pemanfaatan lahan secara optimal juga dapat menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan perubahan iklim.

Kekurangpuasan responden secara eksternal yaitu terhadap perilaku tetangga dalam membuang sampah dan adanya lahan terbengkelai dan menganggur di lingkungannya, melalui penggalan gagasan dan FGD dengan dukungan dari pemerintahan setingkat RT, RW, TP PKK dan Kelurahan diupayakan pengelolaannya secara bersama oleh masyarakat yang berada di sekitar keberadaan lahan tersebut. Lahan yang akan dikelola secara bersama dalam bentuk kebun



bersama adalah lahan yang terbengkelai oleh pemiliknya, lahan pinggir jalan yang tidak mengganggu kepentingan umum, dan lahan di sebrang jalan sepanjang aliran irigasi Kranji.

Pada tahap persiapan proses pengelolaan lahan menganggur dan terbengkelai yang akan dikelola dalam bentuk kebun bersama dilakukan melalui : 1). Kesepakatan masyarakat di sekitar lahan; 2). Memperoleh fasilitasi dari aparat lokal untuk melakukan pendekatan dengan pemilik lahan; 3). Membuat kesepakatan yang jelas antara pemilik lahan dengan kelompok; 4). Pembentukan organisasi kepengurusan; 5). Membuat kesepakatan antar anggota kelompok. Kesepakatan-kesepakatan yang dibuat antar anggota kelompok meliputi pola pengelolaan, jenis tanaman yang diusahakan, pembiayaan, pemanenan, dan pemanfaatan hasil panen.

Para pelaku pola pengelolaan kebun bersama lebih diprakasai oleh kaum perempuan, yaitu ibu rumah tangga melalui bagian dari penerapan 10 segi PKK, yaitu segi ke sembilan yaitu kelestarian lingkungan hidup, melalui pola kerja bakti secara periodik dan secara rutin yang dilakukan melalui sistem piket. Namun demikian ternyata dalam pelaksanaan kerja bakti yang dilakukan secara periodik mampu membangkitkan semangat kaum bapak dan anak-anak untuk ikut serta bekerja bakti mempersiapkan kebun yang akan dikelola oleh kelompok perempuan yang tergabung dalam kelompok dasa wisma dan kelompok PKK RT. Adapun jenis tanaman yang dipilih adalah tanaman sayuran dan bumbu-bumbuan, yang sering dibutuhkan rumah tangga seperti kangkung, sawi, pokcay, kacang panjang, pare, terong, bayam, tomat, kucai, cabe, selada, jahe, kencur, kunyit dan serai. Pembiayaan kebun bersama dilakukan secara bergotong royong dan memakai uang kas kelompok PKK yang didapat dari hasil iuran bulanan anggota. Pada tahap pemanenan hasil panen pada awalnya dibagikan kepada anggota kelompok namun pada panen-panen selanjutnya dijual kepada anggota kelompok dan masyarakat sekitar, apabila waktu panen bersamaan dengan waktu pertemuan PKK pada hasil panen di jual secara lelang kepada yang hadir dalam pertemuan.

Melalui sistem kebun bersama berdampak pada perilaku anggota kelompok dan masyarakat setempat yaitu timbulnya kepedulian kepada lingkungan dan pada lahan pekarangan miliknya sendiri berupa meningkatkan pola pemanfaatannya dan menjaga kebersihan lingkungan; hal ini mampu mengurangi kekumuhan yang ada pada wilayah yang bersangkutan. Dampak ekonomi berupa pengurangan pengeluaran rumah tangga untuk belanja sayur dan bumbu atau terjadi adanya penghematan pengeluaran rumah tangga, secara tidak langsung merupakan peningkatan pendapatan rumah tangga. Dampak pada kelompok berupa peningkatan kegiatan kelompok dan kemandirian keuangan kelompok hal ini terlihat bahwa selama satu periode panen keuangan kelompok untuk RT 2 RW 2 bertambah Rp240.000,00; untuk RT 6 RT 7 dapat bertambah Rp750.000,00 dan RT 5 RW 8 bertambah Rp550.000,00. Dampak pada kehidupan bermasyarakat berupa peningkatan kegiatan dan kerukunan kehidupan bermasyarakat, meningkatkan nilai kegotongroyongan, mendidik generasi muda cinta lingkungan dan menjadikan lingkungan menjadi asri dan segar, tidak terlihat kumuh.



## **KESIMPULAN**

Sistem kebun bersama merupakan salah satu alternatif untuk mewujudkan program Kotaku. Sistem kebun bersama mampu memunculkan eksternalitas positif secara individu, ekonomi dan sosial. Secara individu berupa kepedulian terhadap pemanfaatan pekarangan, secara ekonomi untuk anggota kelompok berupa penghematan pengeluaran rumah tangga untuk belanja sayur dan bumbu dan untuk kelompok berupa peningkatan kegiatan kelompok dan kemandirian keuangan kelompok; dampak sosial berupa meningkatkan kerukunan dan kegotongroyongan kehidupan bermasyarakat, mendidik generasi muda cinta lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terwujudnya pencapaian model pemberdayaan masyarakat berbasis sistem kebun bersama untuk mewujudkan program KOTAKU ini terlaksana berkat dukungan dana dari skim penelitian terapan Kementerian Riset Tehnologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dan bantuan administrasi dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman tahun 2018. Untuk itu kami tim peneliti mengucapkan terima kasih, semoga apa yang kami hasilkan ini memberikan nilai tambah bagi dunia pendidikan tinggi dan kemanfaatan bagi masyarakat. Rasa terima kasih juga kami tujukan kepada Kepala Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas beserta dengan masyarakatnya yang telah berpartisipasi aktif dalam program penelitian ini, semoga model yang telah dihasilkan dari kegiatan penelitian ini dapat dijaga keberlanjutannya dan membawa kemanfaatan yang berkelanjutan pula.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anonim. 2016. Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor : 40 /SE/DC/2016 Tentang : Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Jakarta.
- Anonim. 2014. SK Bupati Banyumas No.050 / 1444 / Tahun 2014 Tentang Lokasi Kawasan Kumuh di Kabupaten Banyumas terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu kawasan kumuh ringan dan kawasan kumuh sedang. Kabupaten Banyumas, Purwokerto.
- Anna Stempel, 2011. Kelompok Tani Wanita di bidang pertanian, Penilaian Kebutuhan Proyek untuk perempuan Aceh di bidang pertanian. Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR) dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NAD (BPTP), Aceh.
- Ashari, Saptana, dan Tri Bastuti Purwantini. 2012. Potential Use of Backyard Land for Food Security. *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 30 (1) : 1 – 18.



**Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers**

*"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan IX"*  
19-20 November 2019  
Purwokerto

---

- Bambang Deliyanto, M.Si, 2014. Pengenalan Lahan. <http://repository.ut.ac.id/4348/1/LING1002-M1.pdf> diakses tanggal 8-10-2019. Diakses 12 Oktober 2019.
- Ganjar Susilo, Suherna, Juari. 2018. Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Program 100-0-100 di Kelurahan Manggar. *Jurnal Abdimas BSI* Vol. 1 (2) : 227-236.
- Khadiyanto Parfi. 2005. Tata Ruang Berbasis Pada kesesuaian lahan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro , Semarang.
- Moleong, Lexy J, 2009, Metodologi Penelitian kualitatif. Penerbit PT Remaja Rosda karya Bandung.
- Munir. 2009. Penelitian Praktis dan Strategis Dalam Rangka Penyiapan Seminar. [http://file.upi.edu/Direktori/FPMIPA/PRODI\\_ILMU\\_KOMPUTER/196603252001121-MUNIR/Metodologi%20Penelitian/RESEARCH\\_Ilkom.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPMIPA/PRODI_ILMU_KOMPUTER/196603252001121-MUNIR/Metodologi%20Penelitian/RESEARCH_Ilkom.pdf). Diakses pada 13Oktober 2019
- Rahajuni Dijan, Suprpto, Sri Lestari, 2017. Model Pengelolaan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Ekonomi Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Studi Kasus Di Kabupaten Banyumas. LPPM Unsoed, Purwokerto.
- Rahajuni Dijan , Suprpto , Lilis Siti Badriah, Sri Lestari, Ascaryan Rafinda. 2017. *Inequality of Income Distribution in Rural and Urban Poor Communities. EKO-REGIONAL, Vol. 12(2): September 2017, 50-56.*
- Sudarti dan Arnold C.Turang. 2015. <http://sulut.litbang.pertanian.go.id/index.php/penyuluhan/info-krpl/632-pemanfaatan-pekarangan>. Diakses 13 Oktober 2019.
- Sugito, Susilowati, Muhammad Al Kholif. 2017. Strategi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Untuk Budidaya Tanaman Obat Keluarga (TOGA), *Penamas Adi Buana* 02 (2): 1- 8.
- Trigus Eko, Sri Rahayu. 2012. Perubahan Penggunaan Lahan dan Kesesuaiannya terhadap RDTR di Wilayah Peri-Urban Studi Kasus: Kecamatan Mlati. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan kota. Biro Penerbit Planologi Undip*, Volume 8 (4): 330-340.